



PROVINSI SUMATERA BARAT

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
2022**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

DATA PROFIL DAERAH ELPPD PROVINSI

NO	KATEGORI	DATA WAJIB ISI
1.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	TIPE KANTOR	TIPE “ B “
3.	ALAMAT OPD	Jln. Setia Budi No. 15 Padang
4.	ALAMAT EMAIL OPD	http://dpmpdsp.sumbarprov.go.id dpmpdspsumbar@gmail.com
5.	NO TELFON OPD	Telp. 0751. 811341, 811343 Fax. 0751.811342
6.	NAMA KEPALA OPD	ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
7.	URUSAN	URUSAN PENANAMAN MODAL
8.	STATUS AKTIF	AKTIF
9.	TOTAL PAGU ANGGARAN OPD	Rp. 13.362.219.389,-
10.	FOTO	~
11.	TITIK KOORDINAT OPD	Lat - 0.938679° Long 100.360467°

PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2023
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730411 199703 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.

B. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan teknis di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

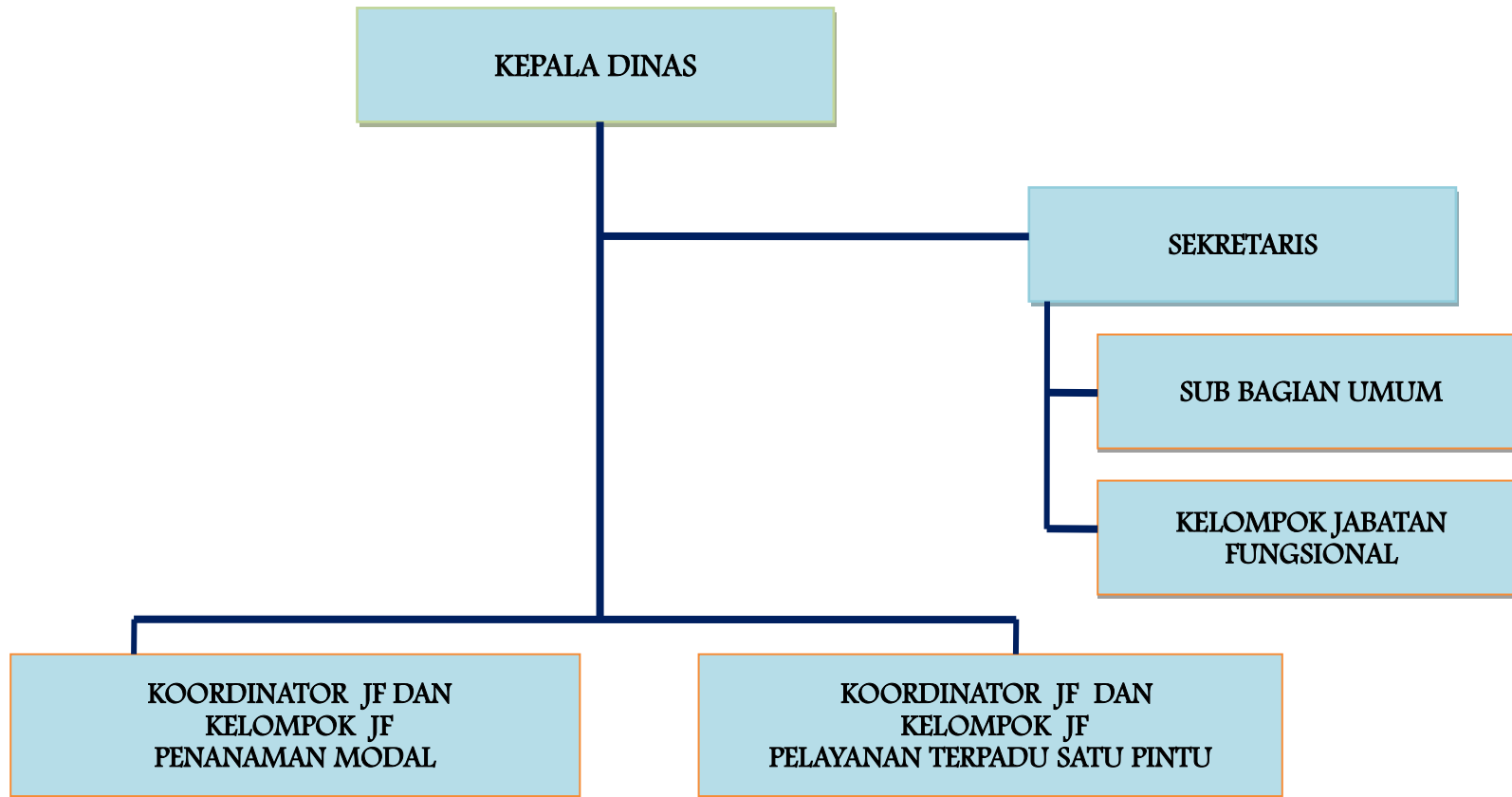
sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 2 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

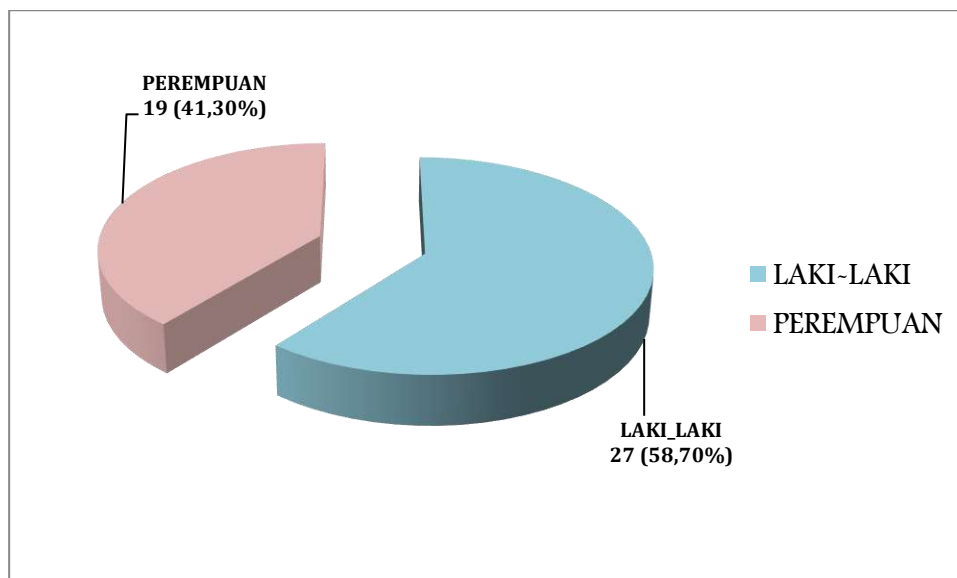
Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 46 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang (58,70%) laki-laki dan 19 orang (41,30%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

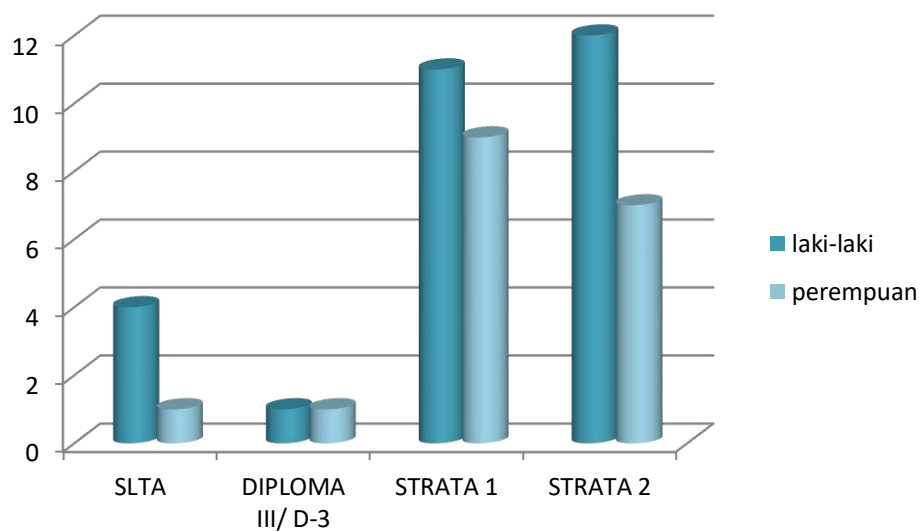
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	4	1	5	10,87%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	1	2	4,35%
4	STRATA 1	11	9	20	43,48%
5	STRATA 2	12	7	19	41,30%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	28	18	46	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 89,13% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 46,34% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

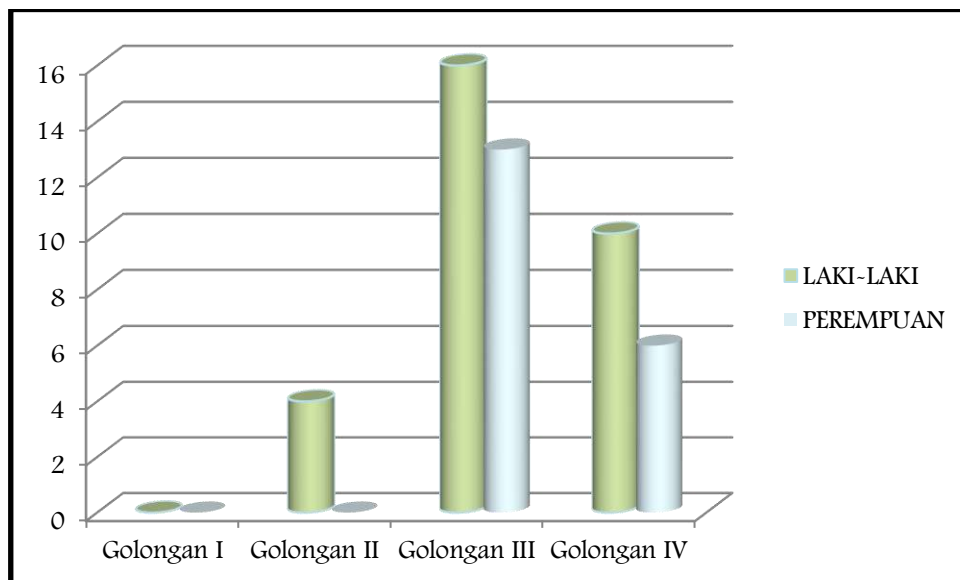
Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	4	1	5	10,87%
3	Golongan III	12	13	25	54,35%
4	Golongan IV	10	6	16	34,78%
	JUMLAH	26	20	46	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 89,13% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepegangannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Gambar 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

C. ANGGARAN

Felaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 didukung oleh Anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 13.362.219.389,- (perubahan anggaran) yang terdiri dari :

BELANJA DAERAH	: Rp.	13.362.219.389,-
a. Belanja Operasi	: Rp.	13.209.050.277,-
▪ Belanja Pegawai	: Rp.	6.301.739.466,-
▪ Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	6.907.310.811,-
b. Belanja Modal	: Rp.	153.169.012,-
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	153.169.012,-

D. IVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.131.783.633,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.495.376.769,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 636.406.864,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Aset DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2022

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah - Tanah	~
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi - Alat Kedokteran	2 unit 11 unit 13 unit 1 unit 276 unit 9 unit 2 unit

3	Golongan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	~
4	Golongan Aset Tetap lainnya - Buku Perpustakaan - Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	~

Sumber: Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP Tahun 2022

E. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas secara professional.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang pelayanan perizinan, ruangan bidang perencanaan, ruangan pengendalian, ruangan pengaduan dan ruangan bidang promosi. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat yang dipergunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

Tabel 1.4.
Daftar Kendaraan Dinas
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	Honda	Caraka
2	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
3	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
4	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
5	Mobil	Honda Accord	Operasional Administrasi
6	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional Administrasi
7	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
8	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
9	Mini Bus	Pajero Sport	Operasional Kepala Badan
10	Mobil Double Gardan	Mitsubishi	Operasional Administrasi
11	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi

Sumber: Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP 2022

F. INFORMASI PELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah khusus pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun perkembangan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2022

TAHUN	PERIZINAN	NON PERIZINAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2021	1.286	954	2.240	1.286 Izin; 954 Non Perizinan
2022	892	1.119	2.011	892 Izin; 1.119 Non Perizinan
TOTAL	2.178	2.073	4.251	2.178 Izin; 2.073 Non Perizinan

Sumber :Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2021 -2022

Perkembangan pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan dapat tercapai dengan tersusunnya Buku Potensi dan Peluang Investasi kabupaten/kota se Sumatera Barat serta Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi dengan URL. sipopei.sumbarprov.go.id.
2. Pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator terselenggaranya Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha nasional/asing tercapai terlaksana di Kab. Pasaman Barat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% atau 5 kemitraan.
3. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

Terkait dengan Keikutsertaan Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh DPM & PTSP dalam rangka mempromosikan potensi dan Peluang Investasi di Sumatera Barat, untuk tahun 2022 tidak ada keikutsertaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam pameran dan sejenisnya.

4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat provinsi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 954 izin dan 2.011 Non Perizinan. Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor Perindustrian, Perdagangan, Pemukiman dan Perumahan. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Sektor	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha Non OSS	Perizinan Non Berusaha	Non Perizinan	Jumlah	Tepat Waktu PTSP %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perikanan dan Kelautan	519	-	-	-	519	99%
2	Kehutanan	8	-	-	60	68	70%
3	Kesehatan	29	-	-	1	30	85%
4	Perhubungan	16	-	-	135	151	80%
5	Ketenagakerjaan	7	-	-	2	9	70%

6	Perindustrian	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
8	Pertanian	27	-	-	-	27	80%
9	Pendidikan	-	-	48	-	48	65%
10	Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	56	56	90%
11	Energi dan Sumber Daya Mineral	78	71	-	-	149	80%
12	Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	14	9	-	-	23	70%
13	PSDA	-	1	-	-	1	0%
14	SOSIAL	-	-	16	4	20	0%
15	Pemukiman dan Perumahan	-	-	-	-	-	0%
16	Pariwisata	47	-	-	-	47	0%
17	Lingkungan Hidup	-	-	-	18	18	0%
18	Koperasi UMKM	2	-	-	-	2	0%
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	843	843	99%
JUMLAH		747	81	64	1.119	2.011	85%
TOTAL		892			1.119	2.011	

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2022

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dan sudah dilaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sumber dana dari APBD dan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilakukan kunjungan ke perusahaan sebanyak 6 perusahaan yang ditargetkan terlaksana 6 perusahaan dengan 1 laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, untuk Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sosialisasi kebijakan Penanaman Modal terkait Perizinan OSS RBA sebanyak 450 orang dari target sebanyak 450 orang sehingga capaian kinerjanya 100% serta 5 PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya

yang ditargetkan terlaksana 7 PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya atau dengan capaian kinerja sebesar 110%.

6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) RBA juga telah berlakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha melalui media masa, yakni media cetak sebanyak 4 kali.

II. DOKUMEN PERENCANAAN

D. RENSTRA

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 dibunyikan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dan selanjutnya Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2021– 2026;
3. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026, sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

VISI

Dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah agar terarah dan berfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, dan sejalan dengan Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;**
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

E. RENJA TAHUNAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidang dan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut penanaman modal sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2021 dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terjadi perubahan yang sangat signifikan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terkait Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8 Kegiatan dengan 28 Sub Kegiatan);
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan);
3. Program Promosi Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan);
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan);
5. Program Pelayanan Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan);
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan).

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 6 Program, 14 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan DPM & PTSP Tahun Anggaran 2022, adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.387.061.458,-	8 kegiatan, 28 Sub Kegiatan
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	728.317.000,-	2 kegiatan, 3 Sub Kegiatan
III.	Program Promosi Penanaman Modal	729.123.550,-	1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan
IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	996.522.731,-	1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan
V.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.467.706.650,-	1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	53.488.000,-	1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan
JUMLAH		13.362.219.389,-	40 kegiatan

Sumber : DPPA DPM & PTSP Tahun 2022

III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN

D. DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 didukung oleh Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 13.362.219.389,- yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi	: Rp.	13.362.219.389,-
• Belanja Pegawai	: Rp.	6.301.739.466,-
• Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	6.907.310.811,-
b. Belanja Modal	: Rp.	153.169.112,-
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	153.169.112,-

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2022 untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

Tabel
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO. URUT	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	KET.
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	13.362.219.389	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.387.061.458	
A	<i>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	195.748.908	
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	90.888.658	
2	KOOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	12.500.000	
3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	11.280.000	
4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA	12.500.000	
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.861.000	
6	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.000.000	
B	<i>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</i>	6.479.904.266	
7	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.110.354.266	
8	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	187.383.000	
9	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	126.767.000	
10	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	32.404.000	

C	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	20.000.000	
11	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	20.000.000	
D	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	210.226.908	
12	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	67.350.000	
13	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	81.558.908	
14	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	61.318.000	
E	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	733.688.309	
15	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.040.000	
16	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	93.198.412	
17	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.511.633	
18	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.774.962	
19	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.080.000	
20	PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	549.083.302	
F	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.970.700	
21	PENGADAAN MEBEL	59.970.700	
G	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.136.122.501	
22	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	23.862.934	
23	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.024.000	
24	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	912.235.567	
F	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	551.339.866	
25	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	269.193.250	
26	PEMELIHARAAN MEBEL	16.000.000	

27	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	220.526.616	
28	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.680.000	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	728.317.000	
A	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	84.392.700	
29	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	84.392.700	
B	<i>PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI</i>	643.924.300	
30	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	96.341.350	
31	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI	547.582.950	
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	729.123.550	
A	<i>PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</i>	729.123.550	
32	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	150.000.000	
33	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	579.123.550	
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.467.706.650	
A	<i>PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	1.467.706.650	
34	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PEIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	996.886.100	
35	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PRIZINAN PENANAMAN MODAL	177.413.400	
36	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	293.407.150	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	996,522,731	
A	<i>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</i>	996,522,731	

37	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	8.840.000	
38	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	730.295.885	
30	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	257.386.846	
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	53488000	
A	<i>URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI</i>	53488000	
40	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	53488000	
JUMLAH		13.362.219.389	

E. REALISASI FISIK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. **9.387.061.458,-** dan dapat direalisasi sebesar Rp. **8.954.493.935,-** atau sebesar **95,39%**. Realisasi Fisik Pelaksanaan kegiatan pada program ini pada umumnya 100% dan rincian realisasi untuk masing-masing sub kegiatan adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keluaran:

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 (dua) dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

2. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Keluaran:

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

Keluaran:

Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

4. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD

Keluaran:

Tersusunnya dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

5. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran:

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

6. **Sub Kegiatan** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran:

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Sinkronnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85%.

- B. **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keluaran:

Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan, Gaji ke 13 dan Gaji ke 14 serta Tunjangan dan Insentif atas retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk 54 ASN, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**Keluaran:**

Terbayarkannya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan dan Pengurus Barang, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**Keluaran:**

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai wujud Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang selanjutnya dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

4. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD.

Keluaran:

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semester SKPD sebanyak 13 dokumen, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 dengan kinerja 100%.

- C. **Kegiatan** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Keluaran:

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 2 dokumen, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Daerah selama 12 bulan.

- D. **Kegiatan** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Keluaran:

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dan Pakaian KORPRI untuk ASN sebanyak 54 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

2. *Sub Kegiatan* Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

Keluaran:

Terlaksananya pengiriman ASN untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi peraturan perundang – undangan sebanyak 44 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 20 jenis, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

2. *Sub Kegiatan* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 13 unit, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 34 jenis, dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Intern sebanyak 22 kali beserta makanan serta minuman yang disediakan untuk pertemuan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

4. **Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan sebanyak 9 jenis dan penggandaan sebanyak 21.258 lembar dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

5. **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Keluaran:

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan / koran dan peraturan perundangan – undangan sebanyak 6 media, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

6. **Sub Kegiatan** Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran:

Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan 59 dokumen laporan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tertibnya Administrasi Umum selama 12 bulan

- F. **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut :

1. **Sub Kegiatan** Pengadaan Mebel

Keluaran:

Terlaksananya Pengadaan Mebel sebanyak 17 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- G. **Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran:

Terlaksananya pengelolaan surat keluar sebanyak 600 surat dengan capaian kinerja sebesar 162,50%

Hasil:

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran:

Terlaksananya pembayaran jasa rekening listrik sebesar 41500 kwh dan telepon sebanyak 3 rekening dengan capaian kinerja serta 1 paket jaringan sebesar 100%

Hasil:

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran:

Terlaksananya pembayaran jasa lembaga pengamanan kantor, jasa lembaga penyedia cleaning service, jasa lembaga penyedia jasa sopir sebanyak 14 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 bulan

- H. **Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor sebanyak 8 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

2. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Mebel

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan mebel kantor sebanyak 200 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

3. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

4. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 96 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Terpeliharanya Barang Milik Daerah selama 12 bulan

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Keluaran:

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk 80 orang serta terlaksananya penyusunan Ranpergub Kebijakan Penanaman Modal dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tersedianya Regulasi Penanaman Modal di Sumatera Barat

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

2. **Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Keluaran:

Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal untuk 80 orang dan 1 dokumen Evaluasi Pelaksanaan RUPM dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Memudahkan Calon Investor Mendapatkan Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Sumatera Bara

Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Keluaran:

Terlaksananya pendataan tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal sebanyak 3 persil, tersusunnya PS proyekinvestasi 1 dokumen, tersedianya Sistem Informasi dan Peluang Investasi (SIPOPEI) 1 sistem, terlaksananya FK Pelaku

Usaha Daerah 1 kali dengan mendapatkan kemitraan 5 kemitraan, terlaksananya konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal 1 kali serta terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman 1 kali, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Memudahkan Calon Investor Mendapatkan Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Sumatera Barat

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

A. *Kegiatan* Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Keluaran:

Terlaksananya kegiatan strategi promosi peluang investasi 1 kali pertemuan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Tersedianya materi promosi investasi Sumatera Barat

2. *Sub Kegiatan* Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi

Keluaran:

Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait penanaman modal sebanyak 8 kali, terlaksananya keikutsertaan DPMPTSP dalam kegiatan promosi investasi sebanyak 3 event dan terfasilitasinya 3 kab/kota dalam upaya pengembangan

ekonomi daerah dan investasi, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Berminatnya calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

A. Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Keluaran:

Terlaksananya penerbitan izin dan non perizinan dengan umlah penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 2.011 izin dan non izin dari target sebanyak 2.000 izin dan non izin dengan capaian kinerja sebesar 100,55%.

tepat waktu dengan kinerja 85% dengan capaian kinerja 102,35% dan tersedianya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi dengan capaian kinerja 100%

Hasil:

Penerbitan izin dan non izin tepat waktu dengan target kinerja 85% dengan capaian kinerja 100%.

2. *Sub Kegiatan* Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya pengukuran indeks kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100% sebanyak 2 kali dan dokumen evaluasi audit lanjutan mutu ISO dengan capaian kinerja 100%

Hasil:

Survei hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar nilai interval konversi IKM 95,34% dan nilai interval IKM sebesar 3,81.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Keluaran:

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja 100% dan terfasilitasi/termediasinya pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan sebanyak 10 pengaduan dengan capaian kinerja 100%

Hasil:

Terfasilitasi dan Termediasinya Pengaduan izin Yang Bermasalah.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- A. **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan penanaman modal kepada 6 Perusahaan dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terciptanya Koordinasi terkait Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari fasilitasi permasalahan investasi sebanyak 6 perusahaan PMA/PMDN dengan capaian kinerja sebesar 100%, terlaksananya bimbingan dan sosialisasi tentang kemudahan berusaha sebanyak 450 dengan capaian kinerja 100% dan terlaksananya forum investasi Sumatera Barat dengan capaian kinerja 100%

Hasil:

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat

3. *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang sebanyak 70 UMKM/perusahaan dari target 40 perusahaan dengan capaian kinerja sebesar 175%

Hasil:

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SITEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- A. **Kegiatan** Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Keluaran:

Terlaksananya pengolahan, penyajian dan pemantauan data terkait perizinan dan penanaman modal dengan capaian kinerja 100%

Hasil:.

Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

F. DATA KINERJA KEUANGAN

Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- A. **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar

Rp. 90.888.658,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.392.200,- atau capaian kinerja keuangan 98,35%.

2. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD sebesar Rp. 12.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.500.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD sebesar Rp. 11.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.246.050,- atau capaian kinerja keuangan 99,70%.

4. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD sebesar Rp. 12.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.484.900,- atau capaian kinerja keuangan 99,88%.

5. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 33.716,785,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.623.400,- atau capaian kinerja keuangan 99,72%.

6. **Sub Kegiatan** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 34.863.465,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.525.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,04%.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah sebesar Rp. 6.110.354.266,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.725.884.071,- atau capaian kinerja keuangan 93,71%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 187.383.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.098.300,- atau capaian kinerja keuangan 99,83%.

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 126.767.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.479.892,- atau capaian kinerja keuangan 98,20%.

4. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebesar Rp. 55.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.308.100,- atau capaian kinerja keuangan 96,22%.

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.745.000,- atau capaian kinerja keuangan 98,73%.

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 67.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.350.000,- atau capaian kinerja keuangan 95,55%.

2. **Sub Kegiatan** Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. sebesar Rp. 81.558.908,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.278.899,- atau capaian kinerja keuangan 99,66%.

3. **Sub Kegiatan** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 61.318.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.073.391,- atau capaian kinerja keuangan 99,60%.

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 29.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.038.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%.

3. ***Sub Kegiatan*** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 93.198.412,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.417.000,- atau capaian kinerja keuangan 94,87%.

4. ***Sub Kegiatan*** Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 29.511.633,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.482.700,- atau capaian kinerja keuangan 99,90%.

5. ***Sub Kegiatan*** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 15.774.962,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.774.750,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

6. ***Sub Kegiatan*** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 17.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.080.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

7. ***Sub Kegiatan*** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar

Rp. 549.083.302,- dan terealisasi sebesar Rp. 544.104.774,- atau capaian kinerja keuangan 99,92%.

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut :

1. **Pengadaan Mebel**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp. 59.970.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.306.800,- atau capaian kinerja keuangan 98,89%.

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 23.862.934,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.497.300,- atau capaian kinerja keuangan 98,47%.

2. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 200.024.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.793.976,- atau capaian kinerja keuangan 86,89%.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 912.235.567,- dan terealisasi sebesar Rp. 907.702.025,- atau capaian kinerja keuangan 99,54%.

H. **Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 269.193.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.543.383,- atau capaian kinerja keuangan 99,76%.

2. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Mebel

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Mebel sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.994.200,- atau capaian kinerja keuangan 99,96%.

3. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 220.526.616,- dan terealisasi sebesar Rp. 220.414.824,- atau capaian kinerja keuangan 99,95%.

4. **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 45.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.515.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,64%.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

I. *Kegiatan* Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebesar Rp. 84.392.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.208.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,78%.

J. *Kegiatan* Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi sebesar Rp. 90.341.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.297.754,- atau capaian kinerja keuangan 99,95%.

2. *Sub Kegiatan* Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi sebesar Rp. 547.582.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 546.115.638,- atau capaian kinerja keuangan 99,73%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

K. *Kegiatan* Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.935.850,- atau capaian kinerja keuangan 99,96%.

2. *Sub Kegiatan* Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebesar Rp. 579.123.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 573.573.452,- atau capaian kinerja keuangan 99,39%.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

L. *Kegiatan* Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. *Sub Kegiatan* Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp.. 996.886.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 988.273.501,- atau capaian kinerja keuangan 99,23%.

2. **Sub Kegiatan** Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp. 177.413.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 177.183.850,- atau capaian kinerja keuangan 99,87%.

3. **Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 293.407.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.783.312,- atau capaian kinerja keuangan 98,76%.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- M. **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 8.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.671.800,- atau capaian kinerja keuangan 86,79%.

2. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

Modal sebesar Rp. 730.295.885,- dan terealisasi sebesar Rp. 704.188.525,- atau capaian kinerja keuangan 99,61%.

3. **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 257.386.846,- dan terealisasi sebesar Rp. 248.353.110,- atau capaian kinerja keuangan 99,13%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

N. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Dengan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan** Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp. 53.488.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.487.923,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

VII. PENUTUP

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan tidak ada permasalahan yang cukup berarti, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan bahkan ada beberapa kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

Sehubungan dengan adanya beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% diantaranya disebabkan :

1. Sisa Anggaran yang cukup besar berada pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Calon ASN sebesar Rp. 384.470.195,- disebabkan adanya pemidahan ASN antar SKPD pada akhir tahun
2. Tidak dibayarkannya Pemakaian Listrik pada Bulan Desember tahun 2022 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sehingga menjadi beban hutang jangka pendek bagi SKPD.
3. Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Dan efisiensi dari sisa - sisa anggaran benar – benar tidak bisa direalisasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini disusun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
TAHUN 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME	RUMUS PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	7	8	9
18.	PENANAMAN MODAL	1.	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi *)	$= \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun 2022} - \text{Jumlah Investasi Tahun 2021})}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2021}} \times 100 \%$ $= \frac{(5.187.640.000.000 - 5.161.169.300.000,-)}{5.161.169.300.000,-} \times 100 \%$ $= \frac{26.270.700.000}{5.161.169.300.000} \times 100\%$ $= 0.51\%$	0.51%	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP	

*) Prognosis Realisasi Investasi tahun 2022 sambil menunggu Press Release dari Kementerian Investasi dan BKPM RI

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKKI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304131997031001

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi			Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
				6	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	7	8	9 (8:7)	10	11	
12	Penanaman Modal	1	1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Perda ttg. pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	1	1	100.00%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
			2	SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah SOP ttg. pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	0	100.00%		Dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	0	100.00%		Belum dilaksanakan Evaluasi karena Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif masih dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	1	100.00%		Dilaksanakan Bisnis Forum di Hotel Balaiung Jakarta 1 kali
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	0	0	100.00%		Tidak ada mengikuti Pameran Penanaman Modal dikarenakan masih kondisi Pasca pandemi covid 19
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4	5	100.00%		Penerimaan misi penanaman modal dari negara Arab Saudi, Qatar serta PHRI Pusat yang berminat untuk berinvestasi di Sumatera Barat
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dilaksanakan	2,000	2,245	112.25%		DPMPTSP memberikan Layanan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik antara lain yaitu Layanan Pendampingan. Layanan Konsultasi dan Layanan Prioritas penyelenggaraan Perizinan.
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2,000	2,011	100.55%		Target 2.000 perizinan dan non perizinan, Realisasi 2.011 perizinan dan non perizinan
			9	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal *)	5,187,640,000,000	5,187,640,000,000	100.00%		Berdasarkan kondisi sampai dengan <i>triwulan 4</i> tahun anggaran 2022, untuk realisasi investasi PMA dan PMDN tercapai sebesar Rp. 5.187.640.000,- dari target sebesar Rp. 5.187.640.000.000,-.
			10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	450	450	100.00%		Untuk tahun 2022 kegiatan Pembinaan untuk Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota 450 orang dalam bentuk Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	5	11	220.00%		Pembinaan Penanaman Modal terhadap PMA dan PMDN dilakukan dalam bentuk Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi yang dihadapi Perusahaan PMA dan PMDN. Untuk target 2021 sebanyak 5 perusahaan PMA dan PMDN dan terealisasi sebanyak 6 perusahaan PMA dan PMDN
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	1	1	100.00%		Data Perizinan dan Non Perizinan dapat berupa Jenis Perizinan, Tata Cara serta Persyaratan, Pengaduan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 30 Desember 2022**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOL-RU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOLONGAN RUANG: IV/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	ADIB ALFIKRI,S.E.,M.Si 19730413 199703 1 001 13-04-1973	IV/c	01-10-2019	KEPALA DPMP&PTSP Eselon : II.A	31-01-2022	3 Tahun	Strata 2 (S2)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Universitas Andalas	LK
GOLONGAN RUANG: IV/B										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2	WIDYA SARI, SE, Ak, MM 19700902 199701 2 001 02-09-1970	IV/b	01-04-2017	SEKRETARIS Eselon : III.A	3-12-2016	2 Tahun 2 bulan	STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	UNP PADANG	PR
GOLONGAN RUANG: III/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
3	KISMEN ATA, SP 19770222 200501 1 011 22-02-1977	III/c	01-04-2015	KASUBAG TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN Eselon: IV.A	23-08-2019	-	STRATA 1 (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL
YANG MEMENUHI DIKLATPIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 30 Desember 2022**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOLRU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1.	KISMEN ATA, SP 19770222 200501 1 011 22-02-1977	III/c	01-04-2015	KASUBAG TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN Eselon: IV.A	23-08-2019	-	STRATA 1 (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL STRUKTURAL
YANG MEMENUHI KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 30 Desember 2022**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOL-RU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOLONGAN RUANG: IV/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	ADIB ALFIKRI,S.E.,M.Si 19730413 199703 1 001 13-04-1973	IV/c	01-10-2019	KEPALA DPMP&PTSP Eselon : II.A	31-01-2022	3 Tahun	Strata 2 (S2)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Universitas Andalas	LK
GOLONGAN RUANG: IV/B										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2	WIDYA SARI, SE, Ak, MM 19700902 199701 2 001 02-09-1970	IV/b	01-04-2017	SEKRETARIS Eselon : III.A	3-12-2016	2 Tahun 2 bulan	STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	UNP PADANG	PR
GOLONGAN RUANG: III/C										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
3	KISMEN ATA, SP 19770222 200501 1 011 22-02-1977	III/c	01-04-2015	KASUBAG TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN Eselon: IV.A	23-08-2019	-	STRATA 1 (S1)	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197304131997031001

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL
YANG MEMENUHI KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN : 30 Desember 2022**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP TEMPAT / TGL LAHIR	GOL RUANG	TMT GOLRU	JABATAN/ESELON	TMT JABATAN	MASA JABATAN TERAKHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	TEMPAT SEKOLAH	JNS KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GOLONGAN RUANG: IV/b										
1	ALRIFJON, S.Sos, MM NIP. 19661207 198903 1 004 07-12-1966	IV/b	01-10-2021	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA Eselon: III.A	21-05-2021		STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	STIE-KBP PADANG	LK
2	ETNA LELI, S.Sos, MM 19650124 199101 2 001 24-01-1965	IV/b	01-10-2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA Eselon: III.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	STIE-KBP PADANG	PR
3	FIRDAUS, SH, MH 19660626 198811 1 001 03-06-1960	IV/b	01-04-2021	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA Eselon: III.A	18-12-2019		STRATA 2 (S2)	HUKUM HUMANIORA	UNES	LK
GOLONGAN RUANG: IV/a										
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
4	YUNIARTI, S.Pd, M.Si 19690601 199803 2 002 01-06-1969	IV/a	01-04-2014	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	EKONOMIKA PEMBANGUNAN	UGM YOGJAKARTA	PR
5	ROY DEFRINALDI EKA PUTRA, ST, MM 19761001 200212 1 005 19-02-1975	IV/a	01-04-2014	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ESELON IV.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	EKONOMIKA PEMBANGUNAN	UGM YOGJAKARTA	LK
6	SYAFWIRDI, SE, M.Si 19680706 198703 1 001 PADANG, 06-07-1968	IV/a	01-04-2017	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	AKUNTANSI	UGM YOGJAKRТА	LK
7	HARDI, SE, MM 19751109 20003 1 003 09-11-1975	IV/a	01-04-2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	MANAJEMEN	STIE-KBP PADANG	LK
8	YUSNARRELIS, S.H 196812291989032002 29-12-1968	IV/a	01-04-2022	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon : IV A			STRATA 1 (S1)			PR
9	EGY JANUARDI, S.STP, M.Si 19870622 200701 1 001 22-06-1987	IV/a	01-10-2022	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	15-05-2019		STRATA 2 (S2)	MAGISTER SAINS	UNAND PADANG	LK
RUANG: III/d										
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
10	MAMAN, S.Hut 19690102 200003 1 004 02-01-1969	III/d	01-04-2012	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	08-03-2019		STRATA 2 (S2)	SARJANA KEHUTANAN	UGM	LK
11	MAINELIZA, SE 19780524 200701 2 004 24-05-1978	III/d	01-10-2019	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	21-05-2021		STRATA 1	MANAJEMEN PERBANKAN	-	PR
12	YUSNARRELIS, SH 19681229 198903 2 002 29-12-1968	III/d	01-04-2017	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 1 (S1)	HUKUM	STIH PAINAN	PR

13	ADI USMAN, S.Pt 19770901 200604 1 009 01-09-1977	III/d	01-04-2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 1 (S1)	PETERNAKAN	UNAND PADANG	LK
14	M. KHADAFI, SE, M.Cio 19821218 200802 1 001 18-12-1982	III/d	01-04-2020	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA L Eselon: IV.A	27-11-2017		STRATA 2 (S2)	M.CIO	UNP PADANG	LK
15	ASRUL, SE 19810830 200902 1 003 30-08-1980	III/d	01-04-2021	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 1 (S1)	AKUNTANSI	UGM YOGJAKARTA	LK
16	ASWANDI, SE 19850722 200902 1 001 22-07-1985	III/d	01-04-2021	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	AMINISTRASI PUBLIK	UNP PADANG	LK
17	YENI FITRIA, SS.M.CIO 19800202 201001 2 008 02-02-1980	III/d	01-04-2022	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon: IV.A	30-12-2016		STRATA 2 (S2)	M.CIO	UNP PADANG	PR
GOLONGAN RUANG: III/c										
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
18	RIO SAHZAN, SS, SE 19780612 200803 1 001 12-06-1978	III/c	01-04-2022	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Eselon IV.A	21-05-2021		STRATA 1 (S1)	SASTRA INGGRIS	UNAND PADANG	LK

KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ADIB ALFIKRI, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197304131997031001